
PENGEMBANGAN UMKM SENTRA KULINER DESA PEKARUNGAN MELALUI FASILITASI PIHAK EKSTERNAL DAN POTENSI EKONOMI LOKAL

***Nur Dilla Komalasari¹, Anggraeny Puspaningtyas², Joko Widodo³**

1), 2), 3) Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

*Email Korespondensi : nurdillanov98@gmail.com

Abstrak

Desa Pekarungan merupakan salah satu dari 16 desa yang ada di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dengan memiliki potensi pada sektor UMKM yang bergerak pada pada berbagai jenis usaha. UMKM yang dimiliki Desa Pekarungan ada 225 usaha yang berpotensi untuk meningkatkan perekonomian lokal, salah satu bidang UMKM yang berpotensi di Desa Pekarungan adalah sentra kuliner. Sektor UMKM kuliner di Desa Pekarungan masih mengalami beberapa masalah dalam mengembangkan usaha mereka. Adapun permasalahan yang dihadapi terkait kepemilikan legalitas, permodalan, serta rendahnya pengetahuan mengenai inovasi produk dan manajemen keuangan. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran fasilitasi pihak eksternal yaitu Pemerintah Desa Pekarungan dan potensi lokal untuk mengembangkan UMKM sentra kuliner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dari eksternal dan potensi internal belum maksimal untuk mengembangkan UMKM sentra kuliner di Desa Pekarungan.

Kata Kunci: UMKM; Pengembangan ekonomi lokal; Peran Pemerintah

Abstract

Pekarungan is one of 16 villages in Sukodono District, Sidoarjo Regency with MSME sector potential which has various types of business. There are 225 MSME in Pekarungan those have the potential to improve the local economy, one of the MSME fields that has potential in Pekarungan Village is culinary center. The culinary MSME sectors in Pekarungan still have some problems in developing their business. The problem they are facing is legality of ownership, Startup Capital, have low knowledge of product innovation and poor financial management. The research method used by the researcher is descriptive qualitative. The purpose of this study is to determine the facilitation role of external parties, Pekarungan Village Government and local potential to develop MSME culinary centers. The results of the study indicate that the role of external and internal potential is still not maximized to develop SME culinary centers in Pekarungan.

Keywords: MSME; local economic development; Role of Government

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM merupakan salah satu bentuk dari usaha ekonomi produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi beberapa kriteria sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM merupakan salah satu pilar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan merupakan wadah pengembangan sosial-ekonomi masyarakat. Selain itu, UMKM juga berperan dalam meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pengentasan rakyat dari kemiskinan, pembangunan daerah serta menciptakan struktur perekonomian nasional yang seimbang dan berkeadilan.

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia berupa kemampuan dalam menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari total yang ada serta dapat mengumpulkan sampai 60,4 dari total investasi (A. H. Putra, 2016). Menurut Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, penumbuhan iklim usaha dapat didorong melalui penetapan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Selain itu Pemerintah Pusat dan daerah juga berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan usaha di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain serta teknologi. (T. G. Putra, 2015). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Jawa Timur terus melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan UMKM. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika (BPS) UMKM yang ada di Jawa Timur berjumlah 6.825.931 unit. Akan tetapi, besar jumlah UMKM yang ada tersebut diikuti pula dengan permasalahan yang menghambat pengembangan UMKM seperti permodalan, pemasaran, ketersediaan bahan baku, penguasaan teknologi, rendahnya penguasaan manajemen usaha, dan kerja sama antar mitra. (Septa Rinawati & Sri Sadewo, 2019). Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam mengatasi permasalahan tersebut sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Adapun upaya yang telah dilakukan berupa bantuan modal, memberikan pelatihan keterampilan, menyediakan fasilitas penunjang usaha, melakukan promosi terhadap produk hingga mengembangkan SDM (Muhamad Bohori, 2019). Hal tersebut gencar dilakukan oleh pemerintah baik dari

pusat maupun daerah untuk mengedepankan pertumbuhan ekonomi melalui UMKM. Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang mendapatkan julukan “Kota UMKM Indonesia” dengan jumlah UMKM sebesar 306.481 yang akan terus bertambah pada setiap tahunnya dan menjadi daerah penyumbang kontribusi terbesar kedua setelah Kota Surabaya dengan total kontribusi sebesar 106,82 triliun rupiah. (Desika Karinayah, 2018)

Pengembangan UMKM yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo yang berupa sebuah kebijakan atau program yakni sosialisasi mengenai legalitas, *bazar* bagi UMKM, dan peningkatan SDM melalui berbagai pelatihan seperti pelatihan pemasaran, pengemasan produk, dan pelatihan dalam hal inovasi produk. Pengembangan semacam ini tentunya perlu dilaksanakan hingga pada level desa. Desa Pekarungan merupakan salah satu dari 16 desa yang berada di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dengan UMKM yang berkembang diberbagai sektor. Berdasarkan data dari Pemerintah Desa Pekarungan terdapat 225 UMKM yang bergerak dalam beberapa macam sektor.

Berikut data mengenai jumlah UMKM di Desa Pekarungan dan klasifikasinya antara lain;

Tabel 1 Jumlah dan Klasifikasi UMKM Desa Pekarungan

No.	Sektor Usaha	Jumlah
1	Kuliner	107
2	Jasa	46
3	Penjualan Barang	102
	Jumlah	225

Sumber : Data IKM Desa Pekarungan, 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa UMKM yang bergerak pada sentra kuliner lebih mendominasi daripada sentra lainnya. Dengan banyak masyarakat yang memiliki usaha di sentra kuliner dan potensi di dalamnya memberikan manfaat pada perekonomian. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa UMKM yang ada di Pekarungan beberapa dari pelaku usaha yang mengalami kendala dalam mengembangkan usahanya. Adapun

kendala tersebut berupa kepemilikan legalitas, permodalan, keterbatasan penguasaan teknologi, dan inovasi produksi. Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu adanya pengembangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pekarungan melalui fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung pengembangan UMKM agar memiliki daya saing dan mampu berkembang dengan maksimal terutama pada UMKM sektor kuliner.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Desa Pekarungan agar dapat mengembangkan UMKM di Desa Pekarungan terutama pada bidang kuliner. Penelitian ini berfokus kepada peran fasilitasi pihak eksternal dan potensi lokal untuk mengetahui, menganalisa dan mendeskripsikan kendala yang dialami oleh pelaku UMKM dalam pengembangan UMKM di Desa Pekarungan. Adapun fokus permasalahan yang peneliti angkat pada penelitian ini ialah bagaimana peran fasilitasi pihak eksternal dan potensi local UMKM dalam mengembangkan UMKM sentra kuliner Desa Pekarungan. Sedangkan tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui perasn fasilitasi dari pihak eksternal dan potensi lokal UMKM dalam mengembangkan sentra kuliner Desa Pekarungan.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul penelitian yaitu Pengembangan UMKM Sentra Kuliner Desa Pekarungan Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi internal, maka Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Berdasarkan (Moleong, n.d.) tentang metode kualitatif, mengemukakan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dan orang-orang yang perilakunya dapat diamati. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan suatu keadaan dilapangan secara nyata, sistematis dan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Pada penelitian ini peneliti terlibat secara langsung dengan objek yang diteliti dengan melakukan observasi serta wawancara secara langsung sehingga metode kualitatif deskriptif merupakan metode yang tepat dalam penelitian ini.

Adapun fokus penelitian ini ialah mengenai peran fasilitasi dari pihak eksternal Pekarungan dan potensi ekonomi lokal UMKM dalam mengembangkan UMKM sentra kuliner di Desa Pekarungan. Adapun lokus penelitian diambil peneliti berada pada Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Peneliti memilih Desa Pekarungan sebagai lokasi penelitian karena terdapat banyak UMKM unggulan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara, seperti hasil observasi dan wawancara. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan studi kepustakaan meliputi dokumen – dokumen dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengembangan Desa dan UMKM.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

- 1) Observasi Pengambilan data dilakukan dengan pengamatan terkait kondisi UMKM dengan tujuan untuk melihat potensi dari setiap UMKM sehingga memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data sehingga dapat mempermudah peneliti dalam mengambil data sebagai bahan dalam mengembangkan Desa Pekarungan.
- 2) Wawancara Pengambilan data dilakukan melalui proses tanya jawab melalui lisan yang berlangsung secara satu arah, dimana pertanyaan dilontarkan oleh pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai. Dalam penelitian ini peneliti melakukan proses wawancara bersama Pemerintah Desa serta pelaku UMKM Desa Pekarungan.

Menurut Miles dan Hubberman menyampaikan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan berlangsung terus menerus selama penelitian berjalan. Kegiatan dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. (Matthew B. Miles, A. Michael Hubberman, n.d.)

- 1) Reduksi Data dalam penelitian ini dilakukan dengan pencatatan data-data saat pelaksanaan observasi terkait pengembangan UMKM di Desa Pekarungan dan

penyederhanaan serta pengabstraksian hasil wawancara oleh Pemerintah Desa terkait fasilitas yang diberikan dalam upaya pengembangan UMKM serta pelaku usaha/UMKM terkait potensi yang dimiliki untuk mengembangkan usahanya.

- 2) Penyajian Data dalam penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan data-data yang diberikan oleh Pemerintah Desa serta hasil wawancara mengenai potensi internal yang dimiliki.

Penarikan Kesimpulan merupakan hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang telah diteliti, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis dan teori. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan berhubungan dengan hasil akhir terkait keselarasan pemberian fasilitas oleh Pemerintah Desa dan potensi internal yang dimiliki oleh pelaku usaha dengan kegiatan pelaksanaan pengembangan UMKM itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Peran Fasilitasi Pihak pemerintah desa berdasarkan potensi lokal UMKM sentra Kuliner di Desa Pekarungan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu bentuk usaha yang berpotensi dalam mengembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, maka perlu mengoptimalkan dan menggali potensi-potensi yang ada dalam proses pelaksanaan dalam rangka meningkatkan pembangunan perekonomian di Indonesia khususnya di daerah perdesaan. Dalam proses mengembangkn UMKM tentu lebih dapat berkembang lagi dengan baik melalui adanya dukungan dari pemerintah dengan memberikan fasilitas kepada UMKM untuk menunjang pelaksanaan dan memajukan usaha yang dijalankan supaya dapat menghasilkan kualitas maupun kuantitas produksi yang baik.

Hal ini dilakukan dalam rangka pembangunan masyarakat sebagai bentuk implementasi pembangunan nasional maupun daerah. Dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat membutuhkan satu kesatuan adanya hubungannya dari modal fisik yang diubah serta dibangun berlandaskan atas intensitas sarana prasarana pada bidang pendidikan dalam upaya pengembangan *human resource* dan keahlian yang dimiliki

oleh tokoh pemberdayaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat agar tetap berkembang (Widjajanti, 2011).

Adapun potensi lokal merupakan potensi yang dimiliki oleh pelaku UMKM, potensi ini kemudian menjadi suatu pijakan utama dalam mengembangkan suatu UMKM. Pemerintah Desa perlu menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh pelaku UMKM, yang kemudian dikembangkan ke arah yang lebih baik melalui fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan potensinya. Pengembangan UMKM bukan hanya tanggungjawab dari pelaku UMKM saja melainkan tanggungjawab bersama antara pelaku UMKM dan juga Pemerintah Desa sehingga tercipta kolaborasi yang mumpuni dan pengembangan UMKM dapat tercapai sesuai rencana.

Upaya pengembangan UMKM bukan merupakan yang harus diambil oleh Pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Akan tetapi, pihak UMKM yang menjadi pihak internal yang akan dikembangkan, dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah. Hal tersebut perlu dilakukan karena potensi yang dimiliki oleh internal UMKM mampu menciptakan kreatifitas usaha dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. (Anggraeni et al., 2013)

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan cara mewawancarai pelaku UMKM sentra kuliner di Desa Pekarungan yaitu mayoritas permasalahan yang dialami oleh pelaku UMKM terdiri dari dua bagian, yaitu legalitas dan pemodalannya. Kendala legalitas yang dialami oleh pelaku UMKM ialah dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha dalam pengembangan usahanya. Pemahaman tersebut kemudian diperkuat dengan kurangnya sosialisasi yang digiatkan oleh pihak pemerintah Desa Pekarungan. Sedangkan kendala berikutnya yaitu kendala pemodalannya, kendala modal yang dialami oleh pelaku UMKM dilatar belakangi oleh pelaku UMKM masih menggunakan dana pribadi untuk menjadi modal, dan belum adanya pemisahan antara konsumsi pribadi dan modal produksi. Selain belum adanya pembukuan sederhana dan pemisahan modal usaha dan konsumsi pribadi, pemerintah Desa Pekarungan juga dianggap belum menyebarkan informasi-informasi penting terkait pengadaan bantuan modal bagi pelaku UMKM di Desa Pekarungan secara merata.

Berikut kendala yang dialami oleh pelaku UMKM di Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang peneliti rangkum dalam tabel.

Tabel 2. Kendala UMKM sentra kuliner di Desa Pekarungan

No.	Nama Pemilik Usaha	Nama Produk/Jasa	Pemasaran	Izin Legalitas	Kendala Modal
1	Asty	Bandeng Difajaya (Aneka Olahan Bandeng)	Online dan Offline	√	
2	Risa	Sambel Pecel Ningrat	Online dan Offline	√	
3	Riyanti	AG Jaya (Sambel Pecel)	Online dan Offline	√	
4	Annie	Sambelku By Dapur Warna Warni (Sambel Cumi)	Online		
5	Nastain	Kering Tempe "UTI"	Offline		
6	Dian Eminingtyas	Tahu Walik crunchy by Omah Zaneta	Online dan Offline		√
7	Legiati	Bubur Ayam Sukodono	Offline		
8	Naya	Ayam Geprek by Dapur Naya	Online		
9	Tanti	Cireng rujak by alfarizki	Online		
10	Menuk	Salad buah murmer L10	Online dan Offline		√
11	Sukandi	Bakso Dowo (Memiliki 3 Grobak)	Offline		
12	Rahmalita	Susu Kambing Etawa "Mas John"	Offline		
13	Rizky Atania	Bakso Endulita	Online dan Offline		
14	Warsono	Budidaya Ale	Offline		√
15	Setya Rahmasih	Lontong Kikil Warung PKC	Offline		√
16	Puji Astuti	Geprek Cak Usup	Online dan Offline		√

17	Wahyu Indah	Mie Pangsit & Bakso Djakarta	Online dan Offline		
18	Jaminin	Keripik Tembolok	Offline	√	√
19	Yuarina	Bumbu Rujak Bu Yua	Online		
20	Nur Nafiah	Inna Fried Chicken	Offline		
21	Noerdjanah	Es Buah	Offline		√
22	Novi Ranawatiningsih	Mie Ayam 69	Offline		√

Sumber : data diolah oleh peneliti, tahun 2022

Berdasarkan data tabel diatas, kendala yang paling banyak dihadapi oleh pelaku UMKM di Desa Pekarungan ialah kendala pemodalannya lalu diikuti dengan kendala legalitas atau perizinan usaha. Mayoritas teknik pemasaran yang dilakukan oleh pelaku UMKM ialah melalui offline dan masih sedikit yang menggunakan *market place* sebagai media pemasaran. Pelaku UMKM di Desa Pekarungan masih belum banyak yang *upgrade* untuk melakukan pemasaran secara *online*, padahal ada banyak sekali UMKM yang memiliki potensi besar jika dipasarkan melalui online, pengembangan produk akan lebih luas dengan cara online dibandingkan dengan cara konservatif.

Pengembangan UMKM menjadi salah satu tanggung jawab dari pemerintah, karena UMKM menjadi sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang banyak dan mempunyai pengembangan ke arah yang positif dalam upaya pengembangan ekonomi lokal (Hariyanto, 2018). Keberhasilan dalam pembangunan ekonomi lokal dilihat dari berbagai indikator yaitu 1) perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan berusaha, 2) perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya, 3) keberdayaan Lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran dan 4) keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat lokal. (Susanti, 2013)

Di Desa Pekarungan, terkait perluasan kesempatan dalam kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat kecil dalam hal ini pemerintah Desa Pekarungan seyogyanya memberikan fasilitasi yang berhubungan dengan usaha perluasan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. Hal yang paling mungkin dapat dilakukan ialah memberikan

pelatihan tentang peluang bisnis bagi pelaku UMKM maupun warga desa pada umumnya, hal ini dapat menimbulkan keinginan bagi warga desa untuk memulai usaha maupun keinginan untuk mengembangkan usaha dan berinovasi sesuai dengan peluang usaha *up to date*. Bentuk fasilitasi tersebut dapat berupa pelatihan, bincang pendapat, sharing, sosialisasi, dan sebagainya.

Salah satu permasalahan yang dialami oleh UMKM sentra kuliner Desa Pekarungan ialah masalah modal yang kemudian akan berdampak kepada proses produksi dan stok barang untuk dipasarkan. Untuk meminimalisir dampak dari permasalahan ini, maka pemerintah desa dapat berkolaborasi dengan mitra baik dari swasta, masyarakat umum, lembaga pendidikan, petugas keamanan dan LSM maupun antar pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut (Hariyoko, 2018). Permasalahan pemodal yang dialami oleh pelaku UMKM di Desa Pekarungan juga merupakan dampak dari kurang meratanya persebaran informasi mengenai bantuan-bantuan yang disalurkan oleh pemerintah desa khusus untuk mendukung pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Adapun potensi yang dimiliki untuk mengembangkan usaha oleh pelaku usaha sentra kuliner di Desa Pekarungan terdiri dari :

a) Pengadaan modal usaha

Dalam menjalankan kegiatan produksi sebagian UMKM sentra kuliner di Desa Pekarungan bukan berasal dari bantuan dari pemerintah pusat maupun desa melainkan menggunakan modal dari tabungan sendiri. Disaat situasi pandemi seperti saat ini yang berdampak pada penurunan pendapatan beberapa dari UMKM sentra kuliner di Desa Pekarungan tidak bisa maksimal dalam memproduksi produk bahkan ada yang mengalami kebangkrutan.

b) Kepemilikan legalitas usaha

Kepemilikan legalitas sangatlah penting dalam mengembangkan potensi usaha dari UMKM. Dengan memiliki surat atau dokumen legalitas usaha seperti sertifikat PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), NIB (Nomor Induk Berusaha) dan lain sebagainya para pelaku usaha akan mendapatkan beberapa manfaat seperti memudahkan pelaku usaha untuk peminjaman dengan jumlah besar di bank

konvensional serta bantuan usaha dari pemerintah, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan mendapatkan kepastian dalam berusaha. Sayangnya hal ini masih diabaikan oleh UMKM sentra kuliner di Desa Pekarungan karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran untuk mendaftarkan usaha yang mereka miliki serta kurang sosialisasi dari Pemerintah Desa Pekarungan.

c) Inovasi pada produk usaha

Hal yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha sentra kuliner dalam memasarkan makanannya tidak hanya sekadar membuat produk dan memiliki cita rasa yang enak, akan tetapi perlu adanya inovasi dalam menjalankan usaha. Inovasi yang dapat dilakukan adalah adanya merek dan logo, kemasan dan menambah beberapa varian produk.

d) Perluasan jangkauan pemasaran

Pelaku UMKM sentra kuliner di Desa Pekarungan dalam memperluas jangkauan pemasaran produk beberapa melalui *offline* (toko, warung, sekolah, dll) dan *online* dengan memanfaatkan sosial media dan *platform* jual beli online.

b. Pengembangan Secara Eksternal dengan Adanya Bantuan Fasilitas dari Pemerintah Desa Pekarungan

Pihak eksternal merupakan pihak yang berada diluar tubuh UMKM, yang memberikan kontribusi yang diperlukan oleh UMKM tetapi bukan merupakan termasuk menjadi bagian dari UMKM. Pihak eksternal yang peneliti maksudkan disini ialah Pemerintah Desa Pekarungan. Pemerintah memiliki peran dalam mengembangkan UMKM yang begitu penting, hal ini berkaitan dengan peraturan dan keberpihakan pemerintah terhadap pengembang UMKM. Keterkaitan ini didasarkan pada perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan kementerian dan juga daerah yang keseluruhan diarahkan untuk perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah yang dimaksudkan dapat berupa keterlibatan pemerintah dalam bentuk pembuatan hingga pengimplementasian kebijakan yang ditujukan untuk mendukung pelaku UMKM. (Supatminingsih et al., 2021)

Langkah pemerintah dalam menuntaskan perannya untuk memfasilitasi pelaku UMKM agar terus berkembang yaitu dengan cara memberikan pelatihan kepada pelaku

UMKM yang terkendala terhadap produksi barang maupun jasa, pemodalannya, hingga legalitas usaha. Adanya pelatihan yang massif diberikan kepada pelaku UMKM diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan kemampuan baru yang berkaitan dengan manajemen usaha, pembuatan kas sederhana, kemampuan berinovasi terkait produk atau jasa yang paling dibutuhkan oleh pangsa pasar hingga pengetahuan mengenai teknik pemasaran yang adaptif. Pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah merupakan salah satu langkah jitu yang dapat diambil untuk melaksanakan tugas fasilitasi yang telah peneliti sebutkan. (T. G. Putra, 2015).

Adapun peran dari Pemerintah Desa pekarungan untuk membantu mengatasi permasalahan yang muncul dalam proses mengembangkan UMKM sentra kuliner yang ada di Desa Pekarungan antara lain;

a) Memudahkan Akses kepada Permodalan UMKM

Modal usaha yang digunakan oleh pemilik usaha umumnya menggunakan uang tabungan sendiri untuk menjalankan usaha produksinya. Mengenai pemberian bantuan modal kepada UMKM, pemerintah Desa Pekarungan telah memberikan akses bagi pelaku usaha terhadap modal untuk melakukan kegiatan produksi. Sumber kucuran dana yang diberikan pemerintah desa berasal dari BUMDes Pekarungan dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi dan UMKM. Dana untuk mendukung pengembangan UMKM oleh pemerintah Desa Pekarungan bersumber dari BUMDes. Dalam pemanfaatan dan pengelolaan BUMDes terhadap UMKM sentra kuliner di Desa Pekarungan belum tersalurkan UMKM sentra kuliner sehingga belum bisa mengembangkan UMKM dengan maksimal.

Sedangkan dana dari Kementerian Koperasi dan UMKM berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) berupa bantuan sosial sebesar 1,2 juta. Adapun bantuan tersebut penyalurannya melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan diberikan kepada setiap pelaku UMKM dengan salah satu syarat penerima memiliki surat usulan calon BPUM dari pengusul BPUM yaitu pemerintah desa. Akan tetapi upaya yang dilakukan tersebut masih kurang efektif dalam menangani permasalahan permodalan di UMKM sentra kuliner karena informasi dan data mengenai bantuan tersebut kurang tersampaikan kepada mereka.

b) Peningkatan Promosi dan Pemasaran Produk UMKM

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam meningkatkan promosi produk dan memperluass pemasaran produk dengan mengadakan bazar atau pameran yang menjual produk makanan hasil produksi UMKM dan pelatihan untuk melakukan promosi melalui online kepada UMKM sentra kuliner. Kegiatan semacam ini belum pernah diadakan belum pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pekarungan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pekarungan yaitu masih berupa mengikutsertakan beberapa UMKM dalam kegiatan seperti bazar atau pameran UMKM yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo.

Selain itu, pelatihan dalam menggunakan sistem IT untuk memasarkan produk *online* seperti web, platform digital atau sosial media belum pernah dilakukan oleh Pemerintah Desa. Hal ini sangat penting dilakukan agar produk hasil olahan UMKM Desa Pekarungan dapat dikenal oleh masyarakat luas.

c) Penyediaan Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana ini bertujuan untuk mempermudah UMKM untuk melakukan kegiatan usaha mulai dari proses produksi hingga pemasaran produk. Bentuk penyediaan seperti alat produksi, tempat untuk menjual hasil produk, dan wadah bagi UMKM seperti paguyuban UMKM untuk menampung permasalahan dalam usahanya. Dari hasil penelitian kami bahwa penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Desa Pekarungan sebagai upaya mengembangkan UMKM sentra kuliner belum tersedia.

KESIMPULAN DAN SARAN**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengembangan UMKM sentra kuliner di Desa Pekarungan melalui peran fasilitasi eksternal dan potensi internal dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengembangan UMKM sentra kuliner melalui peran fasilitasi eksternal yaitu Pemerintah Desa Pekarungan yang berkaitan seperti kemudahan akses permodalan, perluasan jangkauan pemasaran produk, dan penyediaan saran dan

prasarana usaha masih belum efektif. Hal ini dikarenakan belum adanya program dari Pemerintah Desa Pekarungan yang dikhususkan dalam pengembangan UMKM Desa Pekarungan sentra kuliner.

2. Potensi internal UMKM Desa Pekarungan sentra Kuliner dalam salah satu upaya mengembangkan UMKM belum cukup memberikan kontribusinya. seperti dalam pengadaan hal modal mereka masih menggunakan dan pribadi, di saat pandemi seperti ini hal seperti itu akan berdampak pada UMKM sentra kuliner di Desa Pekarungan yaitu kerugian yang besar hingga pada kebangkrutan. Permasalahan tersebut diperparah karena rendahnya kesadaran pelaku usaha akan mendaftarkan legalitas produk. Legalitas produk penting dalam upaya mengembangkan usaha karena berdampak pada meningkatnya kepercayaan konsumen akan produk hasil UMKM kuliner di Desa Pekarungan. Selain itu, SDM yang masih kurang dalam melakukan inovasi produk seperti pembuatan merk dan logo, penggunaan kemasan yang menarik dan ramah lingkungan.

Saran

Berdasarkan permasalahan dalam upaya mengembangkan UMKM peneliti memberikan rekomendasi. Berbasis pada teori pengembangan potensi ekonomi lokal antara lain :

1. Pemerintah memberikan sosialisasi secara merata serta adanya keterbukaan informasi bagi UMKM sentra kuliner di Desa Pekarungan berkaitan dengan program-program dan pelayanan yang dimiliki oleh pemerintah bertujuan untuk mempercepat proses pengembangan UMKM sentra kuliner Desa Pekarungan, sehingga masyarakat mampu mengatasi segala permasalahan yang berkaitan dengan permodalan hingga penjualan produk.
2. Pemerintah Desa Pekarungan perlu meningkatkan pembinaan dan pelatihan dalam mengasah kreatifitas sumber daya produktif agar lebih berinovasi dalam menghasilkan suatu produk UMKM agar produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan wilayah lain.

3. Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana sebagai salah satu bentuk usaha mengembangkan UMKM sentra kuliner di Desa Pekarungan, maka upaya yang perlu dilakukan adalah membentuk paguyuban UMKM sentra kuliner sebagai wadah aspirasi dan konsultasi serta mendirikan sebuah gerai atau toko dengan menjual hasil produksi dan UMKM sentra kuliner dan membuatkan *foodcourt* untuk UMKM yang mempunyai usaha warung kopi dan makanan siap saji.

REFERENSI

- Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. (2013). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1286–1295.
- Desika Karinayah. (2018). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kabupaten Sidoarjo. *Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga*, 1–13.
- Hariyoko, Y. (2018). Pengembangan UMKM di Kabupaten Tuban. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(1), 1011–1015. <https://doi.org/10.30996/jpap.v4i1.1286>
- Matthew B. Miles, A. Michael Hubberman, J. S. (n.d.). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (Vol. 30, Issue 25). <https://doi.org/10.7748/ns.30.25.33.s40>
- Moleong. (n.d.). *Lokasi Penelitian Jenis dan Pendekatan Penelitian Data dan Jenis Data*. 25–36.
- Muhamad Bohori. (2019). PERAN DINAS KOPERASI DALAM PENGEMBANGAN UMKM UNGGULAN DI SURABAYA. In *digilib.uinsby* (Vol. 126, Issue 1).
- Putra, A. H. (2016). Peran Umkm Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(2). <https://doi.org/10.20961/jas.v5i2.18162>
- Putra, T. G. (2015). Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(April), 1–10.
- Septa Rinawati, H., & Sri Sadewo, F. (2019). Pengembangan Model Kemitraan UMKM dengan Usaha Skala Sedang dan Besar di Jawa Timur Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR). *Matra Pembaruan*, 3(2), 67–77. <https://doi.org/10.21787/mp.3.2.2019.67-77>
- Supatminingsih, T., Riesso, A. S., Handayani, A. A., Fatmawati, & Hasan, M. (2021). Pemberdayaan UMKM Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Makassar. *Proceeding Seminar Nasional Teknologi Pendidikan*, 105–114.

Susanti, E. (2013). Pengembangan Ekonomi Lokal Dalam Sektor Pertanian (Studi Pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(4), 31–40.

Widjajanti, K. (2011). *Jurnal Ekonomi Pembangunan Model pemberdayaan masyarakat*. 12.